



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis masing – masing SKPD Tahun 2009 - 2013.

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, mempunyai gambaran nyata yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran serta dapat terukur, Visi dan Misi Bupati Gunung Mas terpilih 2009 – 2013 untuk pedoman adalah sebagai berikut :

1. VISI.

“Terbukanya Isolasi Daerah Menuju Percepatan Peningkatan Kesejahteraan, Kemandirian dan Daya Saing Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat”.

2. MISI adalah perwujudan dari Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Jangka Menengah dan ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah, yang merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda – agenda utama sebagai penentu keberhasilan pencapaian kinerja, Adapun misinya, adalah

- a. Membuka isolasi daerah;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- c. Meningkatkan daya saing dan daya serap Perekonomian daerah;
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. Menegakkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
- f. Meningkatkan kehidupan politik dan sosial budaya;
- g. Menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

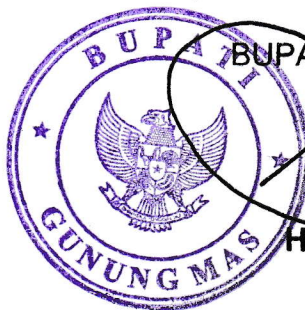
KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Gunung Mas, setiap tahun akhir masa Tahun Anggaran.

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- b. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Gunung Mas;

KELIMA : Demikian Keputusan ini dibuat, agar semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dapat menindaklanjuti dan melaksanakan.

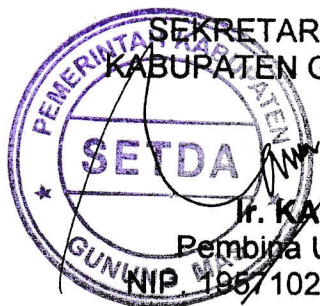
Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Maret 2012



BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Maret 2012



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19571021 198903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 229

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 20 MARET 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS

BIDANG / SEKTOR	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)
Bidang Kepegawaian Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel	1 Rasio PNS terhadap penduduk 2 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan latihan kepemimpinan 3 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 4 Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Badan Kepegawaian Daerah
Bidang Pendidikan.	Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dalam rangka peningkatan taraf pendidikan dan keterampilan hidup secara merata pembinaan kemandirian pemuda dan permasyarakatan olahraga	1 Angka Melek Huruf 2 Rata-rata lama sekolah 3 Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI / Paket A - SMP / Paket B - SMA / Paket C Pendidikan Dasar 4 Angka Partisipasi Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A - APK - APM 5 Rasio Ketersediaan Sekolah 6 Rasio guru / murid 7 Rasio murid perkelas Pendidikan SLTP 8 Angka Partisipasi Sekolah SMP / SMPLB / MTs / Paket B - APK - APM 9 Rasio Ketersediaan Sekolah 10 Rasio guru / murid Pendidikan SLTA 11 Angka Partisipasi Sekolah SMA / SMALB / MTs / Paket C - APK - APM 12 Rasio Ketersediaan Sekolah 13 Rasio guru / murid	Dinas Pendidikan.
Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.		14 Jumlah grup kesenian 15 Jumlah gedung kesenian 16 Jumlah klub olah raga 17 Jumlah gedung olah raga 18 Jumlah Organisasi pemuda 19 Jumlah Organisasi Olah Raga 20 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 21 Jumlah Kegiatan Olah raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		22 Jumlah Perpustakaan 23 Jumlah pengunjung perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

BIDANG / SEKTOR	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)
Bidang Kesehatan	Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan	1 Angka kelangsungan hidup bayi	Dinas Kesehatan
		2 Angka usia harapan hidup	
		3 Prosentase bayi gizi buruk	
		4 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	
		5 Angka Kematian Bayi (AKB)	
		6 Rasio Pos Yandu per satuan balita	
		7 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	
		8 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	
		9 Rasio Dokter per Satuan Penduduk	
		10 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	
		11 Prosentase penduduk berakses air minum	Badan Lingkungan Hidup
		12 Prosentase luas pemukiman yang tertata	
		13 Rasio pemukiman layak huni	
		14 Prosentase rumah tinggal bersanitasi	
		15 Rasio rumah layak huni	
		16 Prosentase penanganan Sampah	
		17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di kota	
Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan penyalahgunaan obat - obatan, pembinaan keterampilan penduduk usia kerja dan pembinaan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat	1 Angka kriminalitas yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
		2 Prosentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
		3 Prosentase Perempuan di Lembaga Swasta	
		4 Rasio KDRT	
		5 Prosentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	
		6 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	
		7 Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK	
		8 Jumlah LSM	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Bidang Sarana dan Prasarana Umum Bidang Perhubungan	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi sungai	1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Jumlah dermaga sungai	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Bidang Ketenagakerjaan dan Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.	Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk	1 Rasio penduduk yang bekerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi.
		2 Rasio Penduduk berKTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3 Jumlah Pasangan Berakte Nikah	
		4 Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi.
		5 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja	
		6 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
		7 Rasio Akseptor KB	
Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya serta memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan yang aman, tentram, damai dan asri	1 Rasio Pamong Praja	Kantor Satpol PP
		2 Jumlah Linmas	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
		3 Rasio Pos Siskamling	

BIDANG / SEKTOR	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)
Bidang Sarana dan Prasarana Umum Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pergerakan roda perekonomian	1 Rasio Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Sekretariat Daerah
		3 Jumlah arus penumpang angkutan umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
		4 Rasio izin trayek	
		5 Jumlah uji kir angkutan umum	
		6 Jumlah terminal bis	
		7 Jumlah dermaga sungai	
		8 Jumlah Jaringan Telepon	
		9 Jumlah Wartel/Warnet terhadap penduduk	
		10 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	
		11 Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal	
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah.	Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM dan Koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk	1 Prosentasi Koperasi Aktif 2 Jumlah UKM non BPR/LKUKM 3 Jumlah BPR/LKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Bidang Pertanahan	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan dalam rangka untuk perlindungan dan kepastian kepemilikan / hak atas tanah	1 Prosentase keluarga yang memiliki lahan usaha 2 Prosentase luas lahan bersertifikat	Sekretariat Daerah
Bidang Pertumbuhan Ekonomi Bidang Laju Inflasi Bidang Pendapatan Per Kapita Bidang Penanaman Modal Bidang Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita Bidang Nilai Tukar Petani	Mempercepat perkembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan serta pemanfaatan sumber daya hutan, perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka menciptakan, memulihkan, menguatkan, mendiversifikasi dan melindungi sumber – sumber pendapatan / mata pencaharian masyarakat	1 Pertumbuhan PDRB 2 Laju Inflasi Kab. Gunung Mas 3 PDRB per Kapita (harga konstan) 4 PDRB sektor Pertanian 5 PDRB sektor Pertambangan dan Pengalihan 6 PDRB sektor Industri Pengolahan 7 PDRB sektor Listrik 8 PDRB sektor Bangunan 9 PDRB sektor Perdagangan 10 PDRB sektor Pengangkutan dan Komunikasi 11 PDRB sektor Keuangan 12 PDRB sektor Jasa 13 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 14 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 15 Angka konsumsi RT per kapita 16 Perbandingan faktor produksi dengan produk	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan	1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	Badan Lingkungan Hidup.
Bidang Kemudahan Perijinan dan peneanaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Meningkatkan sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah	1 Jumlah jenis/macam pajak daerah 2 Jumlah retribusi daerah – HO 3 Jumlah retribusi daerah – SITU 4 Jumlah retribusi daerah – Reklame 5 Jumlah retribusi daerah – SIUP 6 Jumlah retribusi daerah – TDP 7 Jumlah retribusi daerah – IMB 8 Jumlah retribusi daerah – SIUJK	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BIDANG / SEKTOR	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)
Bidang Penataan Wilayah	Meningkatkan kualitas relevansi perencanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah melalui koordinasi yang terintegrasi dengan berbagai SKPD dengan didukung oleh data dan informasi yang relevan	1 Ketaatan terhadap RTRW 2 Luas wilayah produktif 3 Luas wilayah industri 4 Luas wilayah banjir 5 Luas wilayah kekeringan 6 Luas wilayah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum
Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan wilayah dan peningkatan pelayanan publik	1 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perundang-undangan, Sangketa dan Bantuan Hukum.	Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum	1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Sekretariat Daerah
		2 Pertambangan tanpa ijin	Dinas Pertambangan dan Energi.
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1 Penegakan hukum lingkungan	Badan Lingkungan Hidup.
Bidang Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan produksi aneka macam tanaman pangan dan pendistribusian yang merata aneka macam pangan	1 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kantor Ketahanan Pangan

Ditetapkan di : Kuala Kurun
pada tanggal : Maret 2012

BUPAT GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


Ir. KAMAR
Pemina Utama Muda
NIP. 19571021 198903 1 007



BUPATI GUNUNG MAS

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2012 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2012.

Kuala Kurun, 22 Maret 2012



BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

**PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2012**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel	1 Rasio PNS terhadap penduduk 2 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan latihan kepemimpinan 3 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 4 Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	% % % %	3,36 53,85 100 100	
2.	Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dalam rangka peningkatan taraf pendidikan dan keterampilan hidup secara merata pembinaan kemandirian pemuda dan permasyarakatan olahraga	1 Angka Melek Huruf 2 Rata-rata lama sekolah 3 Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI / Paket A - SMP / Paket B - SMA / Paket C Pendidikan Dasar 4 Angka Partisipasi Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A - APK - APM 5 Rasio Ketersediaan Sekolah 6 Rasio guru / murid 7 Rasio murid perkelas Pendidikan SLTP 8 Angka Partisipasi Sekolah SMP / SMPLB / MTs / Paket B - APK - APM 9 Rasio Ketersediaan Sekolah 10 Rasio guru / murid Pendidikan SLTA 11 Angka Partisipasi Sekolah SMA / SMALB / MTs / Paket C - APK - APM 12 Rasio Ketersediaan Sekolah 13 Rasio guru / murid 14 Jumlah grup kesenian 15 Jumlah gedung kesenian 16 Jumlah klub olah raga 17 Jumlah gedung olah raga 18 Jumlah Organisasi pemuda 19 Jumlah Organisasi Olah Raga 20 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 21 Jumlah Kegiatan Olah raga 22 Jumlah Perpustakaan 23 Jumlah pengunjung perpustakaan	% Tahun % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Orang	0,65790383 1 1,857 1,449 1.019 104 98,5 100 22 27 80 78 230 22 49 47 700 22 35 7 20 7 0 0 0 0 0 0 2,100	
3.	Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan	1 Angka kelangsungan hidup bayi 2 Angka usia harapan hidup 3 Prosentase bayi gizi buruk 4 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) 5 Angka Kematian Bayi (AKB) 6 Rasio Pos Yandu per satuan balita 7 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 8 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	% Tahun % Per 100rb Per 100rb % % %	100 100 0 226 23 1 : 55 1 : 600 1 : 99.788	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		9 Rasio Dokter per Satuan Penduduk 10 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 11 Prosentase penduduk berakses air minum 12 Prosentase luas pemukiman yang tertata 13 Rasio pemukiman layak huni 14 Prosentase rumah tinggal bersanitasi 15 Rasio rumah layak huni 16 Prosentase penanganan Sampah 17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di kota	% % % % % % % %	1 : 8.000 1 : 3.000 75 55 74,9 55 91,5 55 75	
4.	Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan penyalahgunaan obat – obatan, pembinaan keterampilan penduduk usia kerja dan pembinaan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat	1 Angka kriminalitas yang ditangani 2 Prosentase Perempuan di Lembaga Pemerintah 3 Prosentase Perempuan di Lembaga Swasta 4 Rasio KDRT 5 Prosentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur 6 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 7 Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK 8 Jumlah LSM	per 1000 penduduk % % % % % % %	0 50,54 21 1,5 0 12 27 9	
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi sungai	1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2 Jumlah dermaga sungai	% Jumlah	19,39 5	
6.	Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk	1 Rasio penduduk yang bekerja 2 Rasio Penduduk berKTP 3 Jumlah Pasangan Berakta Nikah 4 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 5 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja 6 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga 7 Rasio Akseptor KB	% % Jumlah Jumlah Jumlah Anak %	69,15 100 960 0 0 1,9 66,3	
7.	Mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya serta memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan yang	1 Rasio Pamong Praja 2 Jumlah Linmas 3 Rasio Pos Siskamling	10000 Pend 10000 Pend %	1 : 10000 0 0	
8.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pergerakan roda perekonomian	1 Rasio Jaringan Irigasi 2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3 Jumlah arus penumpang angkutan umum 4 Rasio izin trayek 5 Jumlah uji kir angkutan umum 6 Jumlah terminal bis 7 Jumlah dermaga sungai 8 Jumlah Jaringan Telepon 9 Jumlah Wartel/Warnet terhadap penduduk 10 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 11 Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal	% % Orang % Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah	54,9 0,26 5,172 10 20 1 5 10 3 3 1	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
9.	Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM dan Koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk	1 Prosentasi Koperasi Aktif 2 Jumlah UKM non BPR/LKUKM 3 Jumlah BPR/LKM	% Angka Jumlah	0 178 0	
10.	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan dalam rangka untuk perlindungan dan kepastian kepemilikan / hak atas tanah	1 Prosentase keluarga yang memiliki lahan usaha 2 Prosentase luas lahan bersertifikat	% %	0 0	
11.	Mempercepat perkembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan serta pemanfaatan sumber daya hutan, perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka menciptakan, memulihkan, menguatkan, mendiversifikasi dan melindungi sumber – sumber pendapatan / mata pencaharian masyarakat	1 Pertumbuhan PDRB 2 Laju Inflasi Kab. Gunung Mas 3 PDRB per Kapita (harga konstan) 4 PDRB sektor Pertanian 5 PDRB sektor Pertambangan dan Pengalihan 6 PDRB sektor Industri Pengolahan 7 PDRB sektor Listrik 8 PDRB sektor Bangunan 9 PDRB sektor Perdagangan 10 PDRB sektor Pengangkutan dan Komunikasi 11 PDRB sektor Keuangan 12 PDRB sektor Jasa 13 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 14 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 15 Angka konsumsi RT per kapita 16 Perbandingan faktor produksi dengan produk	% % Rp. Juta % % % % % % % % % Perusahaan Rp. Milyar Rp. Juta %	5,75 5 6,53 52,93 10,13 2,73 0,19 5,72 13,23 2,74 1,4 10,93 0 0 623,479 0	
12.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan	1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	0,00	
13.	Meningkatkan sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah	1 Jumlah jenis/macam pajak daerah 2 Jumlah retribusi daerah – HO 3 Jumlah retribusi daerah – SITU 4 Jumlah retribusi daerah – Reklame 5 Jumlah retribusi daerah – SIUP 6 Jumlah retribusi daerah – TDP 7 Jumlah retribusi daerah – IMB 8 Jumlah retribusi daerah – SIUJK	Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis	150 150 150 150 150 150 150 150	
14.	Meningkatkan kualitas relevansi perencanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah melalui koordinasi yang terintegrasi dengan berbagai SKPD dengan didukung oleh data dan informasi yang relevan	1 Ketaatan terhadap RTRW 2 Luas wilayah produktif 3 Luas wilayah industri 4 Luas wilayah kebanjiran 5 Luas wilayah kekeringan 6 Luas wilayah perkotaan	% % % % % %	0 0 0 0 0 2,4	
15.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan wilayah dan peningkatan pelayanan publik	1 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	%	100	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			(04)	(05)	(06)
16.	Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum	1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 2 Pertambangan tanpa ijin	% %	100 100	
17.	Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1 Penegakan hukum lingkungan	%	100	
18.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan produksi aneka macam tanaman pangan dan pendistribusian yang merata aneka macam pangan	1 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	% Ton / Ha	0 4000	